

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0
---	---	---	---

Harian Umum

Online

Provinsi/Kabupaten/Kota Gorontalo

BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

BPK Soroti Pajak Mahyani

AW Thalib : Berpeluang Dihapus

PUNCAK BOTU -GP- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan catatan terkait pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (Mahyani) yang digulirkan Pemprov. Salah satu aspek yang disoroti adalah pengenaan pajak sejumlah 10 persen.

"Biaya mahyani yang masih dipotong pajak 10 persen membuat anggaran untuk mahyani makin kecil," ujar Anggota VI BPK-RI, Prof. Haris Azhar Azis saat menyampaikan rekomendasi BPK terhadap hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov 2019, di sidang paripurna Deprov, kemarin (4/6).

Hal lain yang juga disoroti berkaitan dengan pengadaan material untuk mahyani yang dinilai tidak mempedomani Perpres tentang pengadaan barang dan jasa. Serta pembayaran yang masih dilaksanakan secara tunai.

Anggota Deprov dari fraksi PPP AW Thalib menyambut baik catatan BPK tersebut. Menurutnya, pengenaan pajak sebesar 10 persen untuk setiap unit mahyani memang akan mengurangi biaya pekerjaan. "Padahal kan biaya mahyani tidak terlalu besar. Hanya Rp 30-an juta/unit," ujarnya.

Sorotan BPK ini menurut AW Thalib bisa menjadi salah satu rujukan untuk pembebasan pajak untuk proyek mahyani. Sehingga nilai pekerjaan sesuai dengan nilai proyek yang dianggarkan. "Kalau

Kalau dianggarkan Rp 37,5 juta jadi biaya riil yang akan dibangun untuk mahyani bisa sejumlah itu. Tidak akan lagi dipotong pajak. Sehingga ini akan lebih menyempurnakan pekerjaan Mahyani"

AW THALIB
Anggota Deprov
Fraksi PPP

dianggarkan Rp 37,5 juta jadi biaya riil yang akan dibangun untuk mahyani bisa sejumlah itu. Tidak akan lagi dipotong pajak. Sehingga ini akan lebih menyempurnakan pekerjaan Mahyani," paparnya. Selain Mahyani, ada tiga catatan lain dari BPK. Yaitu berkaitan dengan pengelolaan aset tetap. Ini telah menjadi temuan berulang yaitu hibah aset yang belum terverifikasi. Temuan lain soal kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan. BPK menemukan ada pembayaran untuk ASN yang sudah dimutasi, pensiun, menjalani hukuman dan tugas belajar.

BPK juga memberikan catatan terkait kegiatan perjalanan dinas yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah hari perjalanan.

Belanja modal tak luput jadi temuan. BPK ada pekerjaan yang tidak sesuai kontrak. Terhadap temuan ini, BPK mengingatkan Pemprov untuk bisa menindaklanjutinya. Karena dari catatan BPK, tindak lanjut Pemprov terhadap LHP sebelumnya baru mencapai 66 persen. Diharapkan pada tahun depan, prosentase tindak lanjut bisa meningkat menjadi 75 persen.

AW Thalib mengatakan, menindaklanjuti rekomendasi BPK, Deprov utamanya Komisi I yang bermitra dengan Insepektorat sudah pernah mengevaluasi. Sejauh mana kepatuhan pemprov terhadap rekomendasi BPK. "Atas LHP 2018 dari evaluasi yang kita lakukan beberapa waktu lalu, prosentasenya sebenarnya sudah mencapai 80 persen. Makanya saya kaget juga dengan penyampaian BPK tadi yang katanya baru 66 persen," jelasnya.

AW Thalib juga juga Ketua Komisi I itu mensinyalir, prosentase tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang baru mencapai 66 persen, diakibatkan karena belum adanya respon dari pihak-pihak yang terkait dengan temuan. "Misalnya soal kelebihan pembayaran gaji. Itu kan sudah diputuskan untuk TGR. Tapi mungkin yang bersangkutan belum membayar sehingga saat BPK mengaudit ini terekam dan jadi catatan," pungkasnya. (rmb)